

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW**

### **Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

**Gama Fikran Syuhada, Heryani, Mhd. Fakhurrahman Arif**

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [heryani.s.thi.15@gmail.com](mailto:heryani.s.thi.15@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan akibatnya menimbulkan beberapa permasalahan kerusakan lingkungan seperti banjir yang sering terjadi di Kelurahan Sungai Nibung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu di Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian ini adalah implementasi Perda RTRW dalam meminimalisir terjadinya banjir rob dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Belum maksimalnya disebabkan belum dilakukannya normalisasi sungai secara menyeluruh. Faktor penghambat atau kendala dalam implementasi ini adalah keterbatasan anggaran dan daerah yang masih banyak terdapat rawa sehingga sungai-sungai mengalami pendakalan karena adanya endapan sedimen yang cukup cepat, sedangkan solusi yang diberikan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membersihkan muara sungai hingga sepanjang aliran sungai parit gompong dari endapan sedimen atau lumpur, melakukan peninggian pada titik yang turun akibat kontur tanahnya yang masih berupa rawa.

**Kata Kunci:** Implementasi; Perda Tata Ruang Wilayah; Banjir Rob

#### **Abstract**

*The setting of space is a process system of planning the layout, the use of space, and the control of the use of space. The problem in this study is that the increasing need for space in development leads to the inappropriate use of space causing some environmental damage problems such as the frequent flooding of the river nibung river. The study employs empirical research methods with the approach of legal sociology. The study USES two data sources: primary and secondary data collection, observation, interview and documentation. The research site is the west jdistrict puppeteer. The results of this study are the implementation of the RTRW ordinance in the minimize of the flood of rob, conducted well but not fully. Not yet is the maximum caused by a complete normalization of the river. A deterrent or obstacle factor in the implementation is the limitation of the budget and the sparsely populated areas where the rivers are being converted by rapid sedimentary deposits, while the solution is by*

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob

---

*increasing native income (pad), clearing river estuaries along the flow of the gompong river from sedimentary or silt, Does increase at a drop point because of the substratagem of swamp soil.*

**Keyword: Implementation; Stake Ordinance; Flood Rob**

### PENDAHULUAN

Bencana alam menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu negara ataupun daerah pada sebuah bangsa. Bencana alam yaitu suatu kejadian yang bisa menimbulkan kerusakan ekosistem sehingga akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar terutama membuat beberapa infrastruktur yang telah dibangun mengalami kerusakan. Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir.<sup>1</sup>

Banjir banyak disebabkan oleh curah hujan dan debit air sungai yang sangat tinggi sehingga membuat daerah aliran sungai tidak bisa lagi menampung debit air karena tanah tidak lagi dapat menyerap air dengan baik. Banjir memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi tata ruang dan wilayah terutama dalam hal menanggulangi banjir. Diketahui bahwa secara ekologis ruang terbuka hijau bertujuan untuk meminimalisir genangan dan banjir sekaligus menyimpan air, baik air permukaan yang tertahan maupun air tanah karena infiltrasi.<sup>2</sup> Maka dari itu sangat diperlukan kecakapan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah.

Bencana alam dapat disebabkan karena kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan atau manusia ini sendiri. Kerugian yang di sebabkan bencana misalnya kerusakan lingkungan, pemukiman penduduk, kehilangan harta benda bahkan kehilangan nyawa. Sehingga memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Bencana hidrometeorologi seperti banjir semakin meningkat tiap tahunnya di dunia, termasuk Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rismayani, “Politik Tata Ruang (Analisis Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Menanggulangi Banjir di Kabupaten Soppeng Tahun 2021)”, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022), hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>3</sup> Savitri, E. & Pramono, I. B. (2017). “Analisis banjir Cimanuk Hulu 2016”. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research), 1(2), hlm 97– 110.

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.<sup>4</sup> Maka sistem pengendalian banjir merupakan teknik pengaturan terhadap peristiwa tergenangnya daratan oleh air yang berasal dari sumber-sumber di sekitar daratan yang bersifat sementara. Sumber-sumber air tersebut antara lain sungai, danau, dan laut.

Pemerintah pada masing-masing daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penertiban ruang di daerahnya masing-masing untuk menciptakan kedamaian pada masyarakat. Penertiban ruang diselenggarakan berdasarkan kebijakan yang berlaku yaitu tetap memperhatikan hak milik penduduk setempat atas tanahnya.<sup>5</sup>

Banjir rob sering terjadi di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni pada ruas jalan Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, apalagi jika curah hujan tinggi ditambah air pasang yang mengakibatkan debit air sungai meningkat yang membuat meluapnya air sungai biasanya terjadi antara bulan desember sampai februari, banjir rob ini sangat menyulitkan bagi semua orang termasuk pengendara motor ataupun mobil yang melintas di jalan tersebut sehingga banyak kendaraan yang mogok. Ketinggian bisa mencapai 30-40 cm, banjir ini juga menyulitkan masyarakat sekitar di karenakan banyak rumah warga yang hampir tenggelam akibat debit air yang terlalu tinggi, ketakutan masyarakat ketika banjir adalah hewan yang masuk kerumah seperti ular, kalajengking, biawak yang dapat membahayakan penghuni rumah.<sup>6</sup>

Upaya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi masalah banjir dengan dibentuknya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Di mana pada Pasal 24 Ayat (6) dijelaskan tentang sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir.<sup>7</sup>

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka kali ini peneliti merasa terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

---

<sup>4</sup> Andhy Romdani dan Triyantini S.Putri, “*Analisis Pengendalian Banjir Sungai Dalem Sumba dengan Metode Sudetan*”. Jurnal Technoper, Vol. 1 ISSN 2579-356X (Agustus 2017), hlm 41.

<sup>5</sup> Sutaryono, dkk., “*Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*”, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), hlm 18

<sup>6</sup> Observasi, Jl. Prof Sri Soedewi, kelurahan sungai nibung, tanggal 15 Februari 2024

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 12 Tahun 2013 tentang “*Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033*”, Pasal 24 Ayat 6.

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

dengan mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Menanggulangi Banjir Rob di Kelurahan Sungai Nibung”.

### **KAJIAN TEORI**

#### **1. Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan.<sup>8</sup> Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.<sup>9</sup> Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.<sup>10</sup>

#### **2. Peraturan Daerah**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).<sup>11</sup> Dalam pembentukan peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu: Landasan filosofis, Landasan sosiologis, dan Landasan yuridis.<sup>12</sup>

#### **3. Perencanaan Tata Ruang**

Perencanaan ruang adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah secara implisit disebutkan bahwa

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, hlm, 580.

<sup>9</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Cet-1, ( Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), hlm. 24

<sup>10</sup> Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar : Kedaiaksara, 2013), hlm. 5

<sup>11</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 131-132

<sup>12</sup> *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 15 November 2009, hlm. 13

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob

---

penatagunaan tanah atau pola pengelolaan tata guna tanah adalah sub sistem dari rencana tata ruang wilayah<sup>13/</sup>

#### 4. Banjir Genangan (Rob)

Banjir merupakan permasalahan umum terjadi disebagian wilayah indonesia, terutama di daerah penduduk misalnya di kawasan perkotaan. Dampak banjir ini kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar baik dari segi materi maupun kerugian jiwa.<sup>14</sup>

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan penelitian diantaranya. Dani Andriyanto, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Pasal 31 Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir)”*. Hasil penelitian ini adalah implementasi Perda RTRW pada sistem pengendalian banjir dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal.<sup>15</sup> Rismayani, *“Politik Tata Ruang (Analisis Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kabupaten Soppeng Tahun 2021)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTRW di Kabupaten Soppeng untuk menanggulangi banjir telah dilaksanakan dengan baik tapi belum terealisasi secara menyeluruh sehingga dapat dikatakan belum maksimal.<sup>16</sup> Septian Prasetya Mahaguna, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di Kec.Kresek Tahun 2015)”*. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem pengendalian banjir di kecamatan kresek belum optimal terbukti dengan masih kurangnya anggaran yang tersedia dalam pengendalian banjir, kurangnya sumberdaya manusia yang ada dan proses komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif diantara para pelaksana serta usulan

---

<sup>13</sup> Sutaryano dkk, *Op.Cit*, hlm. 13

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>15</sup> Dani Andriyanto, *Opcit*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>16</sup> Rismayani, *“Politik Tata Ruang (Analisis Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kabupaten Soppeng Tahun 2021)”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

masyarakat yang mengajukan tidak semua dapat terealisasikan oleh para pelaksana sistem pengendalian banjir.<sup>17</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris<sup>18</sup> dan pendekatan sosiologis. Adapun jenis data yang dikumpulkan oleh penelitian disini terdiri dari data primer, sekunder dan tersier.<sup>19</sup> Setting penelitian ini, peneliti mengambil lokasi atau tempat penelitian di Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah, Kepala Dinas PUPR melalui Kasubag Perencanaan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Masyarakat Kelurahan Sungai Nibung.

Analisis data yang dipergunakan yaitu dengan metode penelitian empiris, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan inteprestasi data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Perda No 12 Tahun 2013 di dinas PUPR dalam meminimalisir terjadinya banjir rob di Kelurahan Sungai Nibung.**

Implementasi dapat di ukur dari tujuan kebijakan melalui sebuah program, implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Seperti yang kita ketahui kelurahan sungai nibung terutama pada jalan lintas parit gompong memang menjadi langganan banjir rob setiap tahunnya dan masalah ini sangat berdampak sekali terhadap pengguna jalan yang ingin melintas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Rizal Mustakim Selaku Staf Bagian Penataan Ruang Dinas PUPR, ia mengatakan bahwa:

---

<sup>17</sup> Septian Prasetya Mahaguna, *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Studi Kasus Sistem Pengendalian Banjir Di Kec.Kresek Tahun 2015)”*, (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017).

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur :Grafika, 2009) hlm 105.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 106.

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob

---

“Jadi gini, memang benar di kelurahan sungai nibung itu memang langganan banjir tiap tahunnya pas air pasang besar, untuk jalan lintas parit gompong itu merupakan jalan provinsi tetapi kami dari dinas PUPR memiliki peran di situ seperti berkordinasi tentang kondisi jalan kepada provinsi dan melakukan pemeliharaan sepanjang ruas jalan tersebut, untuk banjir rob ini kita sudah menyiapkan Perda RTRW yang mana tugasnya itu ada di bidang perairan, masalah banjir rob ini memang sedang kami fokuskan mengingat dampaknya yang sangat buruk bagi warga maupun pengguna jalan. Perda RTRW ini cakupannya luas sekali maka dari itu kami dari dinas PUPR melakukannya secara bertahap tidak semuanya dapat terselesaikan dengan sekali pengerjaan saja”<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti ketahui bahwa memang benar di Sungai Nibung sering terjadinya banjir seperti yang diakui oleh narasumber dan Dinas PUPR melalui bidang perairan akan mencari solusi untuk menanggulangi bencana banjir rob ini melalui Perda RTRW yang telah disepakati.

Hal serupa juga disampaikan oleh warga yang bernama bapak Alex seorang pemilik bengkel sepeda motor, ia mengatakan bahwa:

“Jalan disini memang langganan banjir tiap tahunnya sudah dari dulu sewaktu jalan ini masih satu ruas, tetapi tidak seperti sekarang, tiap tahun debit airnya pasti bertambah, saya selaku pemilik bengkel juga merasa terdampak akibat banjir ini, sampai saya harus memindahkan lokasi bengkel saya ke tempat yang lebih tinggi, dikarenakan lokasi lama itu rendah sekali apabila banjir air memenuhi bengkel saya, saya berharap pemerintah daerah dapat menangani dan mencari solusi bagi kami”.<sup>21</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh warga yang bernama bapak fadil pemilik toko sembako, ia mengatakan bahwa:

“Jika terjadi banjir, airnya bisa sampai masuk kedalam toko saya. Tahun kemarin ketinggian air di dalam toko sekitar 40 cm, sehingga saya

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Rizal Mustakim (Staf Bagian Penataan Ruang)* pada tanggal 08 Juli 2024, Pukul 09.30 wib.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Alex (Pemilik Bengkel Motor)* pada tanggal 10 Juli 2024, Pukul 10:40 wib.

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob

---

kesusahan untuk berjualan, belum lagi banyak sembako saya yang kerendam air jika lambat untuk di pindahkan ke tempat yg tinggi, air di sini dak tentu naiknya kadang siang kadang malam, itu etalase saya habis berkarat terkena air banjir”.<sup>22</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh warga yang biasa di panggil Bapak kitting seorang pemilik usaha tambal ban mobil, ia mengatakan bahwa:

“Banjir di sini dak pernah selesai-selesainya sejak saya kecil udah banjir tetapi tidak seperti sekarang, waktu jalan nya masih satu ruas kemarin ada saluran derainase di samping jalan tetap lah juga banjir, apa lagi sekarang saluran drainasenya tidak ada hanya sekedar trotoar, air kita sini apabila banjir itu membawa lumpur, nah lumpur itu yang bisa buat saluran air dangkal apabila tidak rutin dirawat dan dibersihkan. Jika banjir air nya juga masuk kedalam tempat saya ini makanya saya tinggikan tempat saya agar airnya tidak bisa masuk ke dalam.”<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa bencana bajir rob ini sangat berdampak kepada perekonomian warga sekitar mengingat debit air yang terus meningkat setiap tahunnya persoalan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk bisa menaggulangi bencana yang terjadi tahunan ini, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Usman Santoso, SE selaku Staf Bidang Sumberdaya Air, ia mengatakan bahwa:

“Saat ini kami sedang melakukan normalisasi sungai dan peninggian jalan di beberapa titik. Memang untuk di kelurahan sungai nibung belum kami lakukan normalisasi sungai mengingat ada pekerjaan normalisasi yang belum selesai tetapi untuk jalan ada yang sebagian sudah kami tinggikan semoga itu dapat mengurangi banjir rob nantinya.”<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Dinas PUPR maupun Masyarakat Kelurahan Sungai Nibung dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Fadil (Pemilik Toko Sembako)* pada tanggal 10 Juli 2024, Pukul 11:20 wib.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Kitting (Pemilik Usaha Tambal Ban Mobil)* pada tanggal 10 Juli 2024, Pukul 11:50 wib.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Usman Santoso, SE (Staf Bidang Sumberdaya Air)* pada tanggal 15 Juli 2024, Pukul 09:00 wib.

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

telah membuat aturan tentang menanggapi banjir rob tetapi penerapan belum maksimal di karenakan banyak terjadi kendala di lapangan, seharusnya Pemerintah melalui dinas PUPR dapat menangani dengan cepat karena itu sudah tugas yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

### **2. Kendala yang dihadapi oleh dinas PUPR dalam meminimalisir terjadinya banjir rob di Kelurahan Sungai Nibung**

#### **a. Anggaran**

Dalam meminimalisir terjadinya bajir tentu pemerintah pasti memiliki kendala yang terjadi di lapangan, begitupula yang dialami oleh Dinas PUPR dalam meminimalisir terjadinya banjir di sungai nibung, banyak di temukannya kendala di lapangan seperti anggaran yang kurang memadai. berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Rizal Mustakim selaku Staf Penataan Ruang Dinas PUPR, ia mengatakan bahwa:

“disetiap pekerjaan itu pasti ada kendalanya seperti anggaran nya, pasti jika ingin melakukan sesuatu itu harus ada anggarannya sehingga kami bisa membeli alat-alat penunjang untuk memanggulangi banjir ini, maka dari itu kami selalu mengupayakan semaksimal mungkin agar banjir ini dapat terselesaikan dengan secepatnya walaupun dengan anggaran yang seadaanya”.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti ketahui bahwa Anggaran menjadi faktor paling utama yang menghambat proses implementasi kebijakan Perda RTRW terkait sistem pengendalian banjir, tanpa adanya anggaran yang memadai maka kualitas sarana prasarana yang diberikan juga tidak maksimal. Keterbatasan alat penunjang juga berpengaruh besar karena pengerjaan bisa membutuhkan waktu yang lama mengingat di Tanjung Jabung Barat khususnya Tungkal Ilir banyak terdapat sungai-sungai yang harus di normalisasikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Usman Santoso, SE selaku Staf Bidang Sumberdaya Air, ia mengatakan bahwa:

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Rizal Mustakim (Staf Bagian Penataan Ruang)* pada tanggal 08 Juli 2024, Pukul 09:30 wib

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

“betul kendala dilapangan itu sangat banyak terutama ada di anggaran untuk normalisasi sungai itu membutuhkan biaya yang lumayan besar makanya kami melakukan nya secara bertahap, seperti sekrang kami lagi meakukan normalisasi di sepanjang sungai parit 3, alat exskapator amfibi yang di gunakan untuk normaisasi sungai itu hanya ada satu unit”.<sup>26</sup>

b. Muara Sungai yang menyempit

Muara sungai yang menyempit juga menjadi masalah utama sehingga banjir bisa terjadi, karena air tidak bisa maksimal untuk masuk ke sungai-sungai kecil maupun keluar, akibatnya debit air tida merata tersalurkan sehingga terdapat titik-titik yang airnya melimpah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Usman Santoso, SE selaku Staf Bidang Sumberdaya Air, ia mengatakan bahwa:

“muara sungai yang menyempit juga menjadi penyebab terjadinya banjir dan itu juga menjadi kendala kami dilapangan karena sebelum mengeruk bagian muara sungai, kami harus mengeruk bagian hulu sungai terlebih dahulu supaya air yang masuk tidak terlalu deras dan itu memudahkan alat kami untuk bertugas, sungai itu panjang makanya butuh waktu yang umayan lama untuk bisa mencapai ke muara sungai, muara sunga yang mengecil itu bisa terjadi karna adanya endapan sedimen tanah.”<sup>27</sup>

c. Kontur Tanah

Kontur tanah di kelurahan sungai nibung masih banyak rawa akibatnya permukaan tanah disana cepat menurun dapat di lihat dari permukaan jalan yang menurun dari tahun ke tahun, ini juga menyebabkan sungai-sungai yang ada disana mengalami pengendapan sedimen yang cukup cepat yang membuat sungai-sungai dangkal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Usman Santoso, SE selaku Staf Bidang Sumberdaya Air, ia mengatakan bahwa:

“Kontur tanah di kelurahan sungai nibung juga masih banyak terdapat daerah rawa akibatnya permukaan tanah menurun dengan cepat itu menyebabkan debit air ketika banjir bertambah, ditambah lagi dengan

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Usman Santoso, SE (Staf Bidang Sumberdaya Air)* pada tanggal 15 Juli 2024, Pukul 09:20 wib.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Usman Santoso, SE (Staf Bidang Sumberdaya Air)* pada tanggal 15 Juli 2024, Pukul 09:20 wib

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

adanya endapan sedimen yang banyak yang di hasilkan oleh daerah rawa berakibat pada cepatnya pendakalan sungai”.<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa anggaran, muara sungai yang menyempit serta kontur tanah lah yang menajdi penghambat dinas PUPR dalam melaksanakan Perda RTRW, karena cakupan dari perda ini sangat lah luas, hampir semua aspek daerah ada didalam perda ini sehingga mnyelesaikan masalah ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

### **3. Upaya yang dilakukan oleh dinas PUPR dalam meminimalisir terjadinya banjir rob di Kelurahan Sungai Nibung**

#### **a. Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)**

Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, baik sebagai pelayanan publik maupun pembangunan daerah. Permasalahannya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD umumnya belum mampu mengidentifikasi pendapatannya dan sebagian besar daerah masih belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Rizal Mustakim Selaku Staf Bagian Penataan Ruang Dinas PUPR, ia mengatakan bahwa:

“kalau untuk anggaran kita selalu ngajuin ke atas ngajuin untuk penambahan anggaran tapi kita juga harus ngeliat situasi juga tentang PAD kita pendapatan asli daerah kita itu juga kita harus ngukur itu walaupun kita ngajuin anggaran tinggi tapi pendapatan asli daerah kita tetap ya kurang-kurang pas karena anggaran kita yang terbatas solusinya dari kebijakan pimpinan naikin pendapatan asli daerah sebenarnya lebih kearah itu kebijakannya”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Usman Santoso, SE (Staf Bidang Sumberdaya Air)* pada tanggal 15 Juli 2024, Pukul 09:30 wib

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Rizal Mustakim (Staf Bagian Penataan Ruang)* pada tanggal 16 Juli 2024, Pukul 14:30 wib

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Usman Santoso, SE selaku Staf Bidang Sumberdaya Air, ia mengatakan bahwa:

“Kami dari bidang sumberdaya air selaku pelaksana penormalisasian daerah sungai dan rawa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang turun kepada kami, untuk anggaran saat ini memang sangat kurang maka dari itu kami berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

b. Melakukan normalisasi sungai

Dalam upaya penanganan banjir dinas PUPR dalam waktu dekat ini akan melakukan normalisasi di sepanjang aliran sungai parit gompong yang ada di Sungai Nibung guna mengantisipasi banjir yang akan datang di penghujung bulan ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Usman Santoso, SE selaku Staf Bidang Sumberdaya Air, ia mengatakan bahwa:

“kami dari dinas PUPR bagian Sumberdaya air akan melakukan normalisasi sungai parit gompong yang berada di Kelurahan Sungai Nibung, karena jika di lihat sungai itu sudah banyak terdapat endapan sedimen lumpur apalgi di muaranya pasti sudah menyempit di karenakan aliran sungai yang kurang terawat, dalam waktu dekat ini akan kami normalisasikan kembali aliran sungai nya, saat ini kami sedang mengerjakan aliran sungai yang ada di sepanjang parit 3”.<sup>30</sup>

c. Melakukan peninggian pada kontur tanah yang turun

Dalam meminimalisir terjadinya banjir Dinas PUPR melakukan peninggian ruas jalan yang memungkinkan banjir yang parah akibat kontur tanah yang menurun, walaupun itu jalan provinsi tetapi kabupaten berhak ikut andil didalamnya dengan cara berkoordinasi kepada provinsi tentang kondisi jalannya sehingga memungkinkan untuk melakukan peninggian mengingat jalan ini adalah akses utama lintas Kualatungkal-Jambi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Rizal Mustakim selaku Staf Penataan Ruang Dinas PUPR, ia mengatakan bahwa:

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Usman Santoso, SE (Staf Bidang Sumberdaya Air)* pada tanggal 16 Juli 2024, Pukul 14.00 wib

## **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

“jika dilihat ada sebagian titik jalan yang kami tinggikan itu merupakan sebuah strategi kami dalam mengurangi debit air yang melebar ke jalan karena apabila sudah banjir daerah yang kami tinggikan itu merupakan titik yang paling parah, karena itu akses jalan satu-satunya bagi masyarakat, walaupun itu jalan provinsi kami tidak lupa pula untuk berkordinasi tentang permasalahan yang ada sehingga di putuskanlah untuk meninggikan ruas jalan tersebut”.<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh dinas PUPR itu dapat mengatasi terjadinya banjir Rob mengingat dampak yang sangat buruk apabila banjir ini tidak di atasi dengan serius, banyak masyarakat yang mengeluh akan hal itu semoga apa yang dilakukan oleh dinas PUPR benar-benar dapat mengatasi masalah ini.

### **KESIMPULAN**

Implementasi Tentang Perda RTRW sudah ada tetapi belum maksimalnya penerapan yang dilakukan oleh dinas PUPR dalam menangani masalah banjir terlihat dari ukuran dan tujuan kebijakan sistem pengendalian banjir di kelurahan Sungai Nibung tidak optimal. Kendala yang di hadapi pemerintah dalam meminimalisir terjadinya banjir rob seperti: anggaran yang kurang memadai, terjadinya endapan sedimen yang membuat sungai menyempit, kontur tanah yang rawa sehingga cepat terjadinya sedimen atau endapan di dasar sungai. Upaya yang dilakukan pemerintah tentang meminimalisir terjadinya banjir rob yaitu dengan cara: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membersihkan muara sungai hingga sepnajang aliran sungai parit gompong dari endapan sedimen atau lumpur, melakukan peninggian pada titik yang turun akibat kontur tanahnya masih berupa rawa.

Sumber daya finansial lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh masalah yang menjadi penyebab banjir di Kelurahan Sungai Nibung dapat di selesaikan mengingat dampak nya buruk bagi masyarkat sekitar, penulis berharap untuk di bangun sistem pengendalian banjir sehingga masyarakat yang terkena dampak dapat berkurang.

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Rizal Mustakim (Staf Bagian Penataan Ruang)* pada tanggal 16 Juli 2024, Pukul 14:30 wib

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW  
Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

**REFERENSI**

- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Andhy Romdani dan Triyantini S.Putri, “Analisis Pengendalian Banjir Sungai Dalem Sumba dengan Metode Sudetan”, *Jurnal Technoper*, Vol. 1 ISSN 2579-356X, 2017.
- Kementrian Agama RI, *ALJAMIL*, Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012.
- Kodoatie, Robert J dan Roestam Sjarief, *Menjaga Kedaulatan Air*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Kodoatie, Robert J. dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Mulyono Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita & Tantangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 15 November 2009.
- Pertaruran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033.
- Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Savitri, E. & Pramono, I. B, “Analisis banjir Cimanuk Hulu 2016”, *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*”, *Journal of Watershed Management Research*, 2017.

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RT RW  
Di Dinas PUPR Dalam Meminimalisir Banjir Rob**

---

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), Cet ke-2, Jambi : Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014.

Sutaryono, dkk., *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta: STPN Press, 2020.

Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-7, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Timur :Grafika, 2009.